



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2021**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....	30
BAB III	58
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja	63
3.3. Program dan Kegiatan	58
BAB IV	73
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
BAB V	88
PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan BPKAD Kota Magelang	8
Tabel 2.2	Proporsi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020.....	10
Tabel 2.3	Jumlah Rekomendasi BPK Terkait Aset Daerah	11
Tabel 2.4	Kinerja Program yang Memberikan Kontribusi terhadap Capaian Sasaran.....	12
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan II Tahun 2021	13
Tabel 2.6	Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2015-2021.....	13
Tabel 2.7	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang S/D Triwulan II Tahun 2021.....	15
Tabel 2.8	Sasaran Strategi Tahun 2021	22
Tabel 2.10	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Magelang.....	31
Tabel 2.11	Realisasi dan Target Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang.....	33
Tabel 2.12	Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2020-2021.....	34
Tabel 2.13	Target Belanja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022 dan 2023.....	35
Tabel 2.14	Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2021 Kota Magelang	37
Tabel 3.1	Capaian Indikator Makro Nasional.....	59
Tabel 3.2	Capaian Indikator Makro Jawa Tengah.....	59
Tabel 3.3	Identifikasi Isu-isu Strategis Pelayanan OPD.....	60
Tabel 3.4	Penjelasan Visi.....	62
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	62
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Program	63
Tabel 3.7	Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Magelang.....	66
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Badan Pengelolakeuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Perubahan Tahun 2021.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun RKPD Perubahan Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan KUA-PAS Perubahan 2021 yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 343, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021; dan/atau

4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pengelolaan keuangan dan aset daerah tahunan Pemerintah Kota Magelang dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

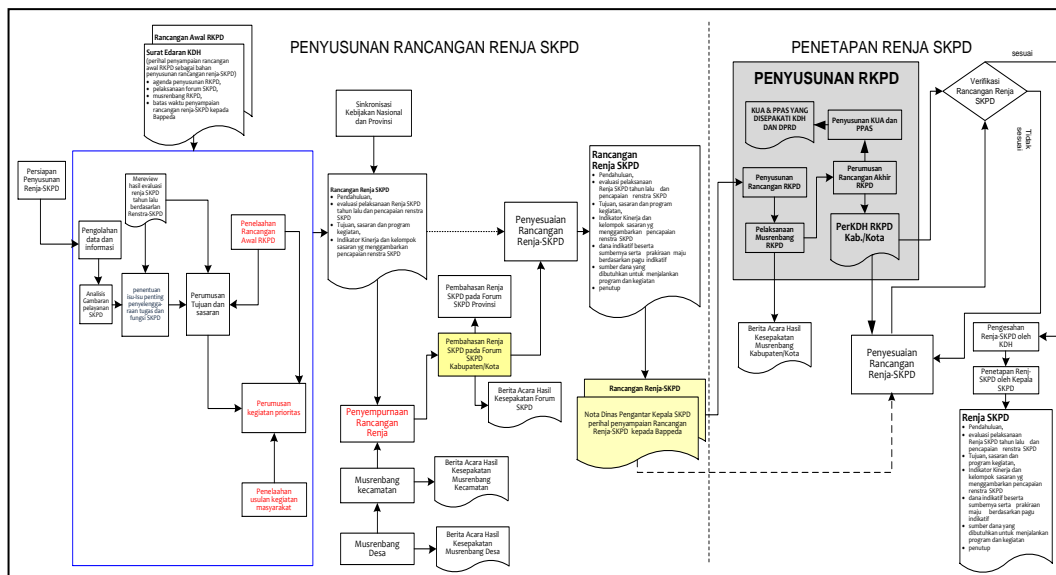
1. RENJA PERUBAHAN SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun dengan menyesuaikan adanya perubahan kebutuhan dan anggaran sesuai kondisi yang berlangsung;
2. RENJA PERUBAHAN SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021.
3. RENJA PERUBAHAN SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis RENJA PERUBAHAN SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA PERUBAHAN BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, antara lain:
 - a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan dan mengacu pada RKPD Perubahan tahun berjalan;
 - b. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;
 - c. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Keistimewaan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang adalah dikarenakan disusun pada masa transisi antara pelaksanaan tahun terakhir Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan juga disusun secara paralel dengan penyusunan Renstra BPKAD Kota Magelang

Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Di samping itu Renja Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang disusun ketika pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia dan dunia yang dampaknya masih terasa di tahun 2021. Memperhatikan hal tersebut maka Renja BPKAD Kota Magelang disusun dengan mengakomodir Visi Misi Walikota terpilih yaitu MAJU, SEHAT dan BAHAGIA yang akan dijabarkan dan dilaksanakan mulai perubahan tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2021 dimana RKPD Perubahan Tahun 2021 mempunyai nilai strategis karena merupakan masa transisi pergantian kepemimpinan kepala daerah sehingga bertepatan dengan penyusunan dan proses penetapan RPJMD 2021-2026 sebagai Peraturan Daerah. Proses perencanaan-penganggaran untuk Perubahan Tahun 2021 sudah berada pada rentang waktu kepemimpinan Kepala Daerah yang baru, dalam hal ini adalah dr. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp. PD sebagai Walikota dan Drs. KH. M. MANSYUR, M.Ag sebagai Wakil Walikota, sehingga harus sudah nampak adanya implementasi penjabaran Visi Misi untuk periode waktu 2021-2026.

RKPD Perubahan Kota Magelang Tahun 2021 ini menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggarannya tahun 2021. Rancangan Akhir Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKAD Kota Magelang tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan BPKAD Kota Magelang yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Magelang Tahun 2021. Adapun Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD seperti yang kami Gambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Penyusunan Rancangan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 2021 Tanggal 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kota Magelang Tahun 2021;
21. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 050.23/ /440Tahun 2021 tanggal 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2021 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Tujuan dibuatnya Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD Kota Magelang agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman/dasar serta acuan bagi penyusunan Program dan Kegiatan pada perubahan anggaran yang dilaksanakan setiap tahunnya;
4. Mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Dengan demikian dokumen Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran perubahan BPKAD dan sebagai dasar penentuan KUAP dan PPASP, serta RKAP APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala BPKAD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA MAGELANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut dinyatakan bahwa BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah perubahan suatu program dan kegiatan pada Tahun 2021.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja BPKAD Kota Magelang sampai dengan Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil

rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
 - b. Tujuan yang dikehendaki;
 - c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
 - d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta Bidang/Sub Bidang pelaksana.
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang sampai dengan triwulan II yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Kinerja Makro Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Magelang

No	Indikator	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (TW.II)
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	27.83	30.70	32.76	35.22	36.17	31,26
2	Derajat Otonomi Fiskal	21.77	23.49	37.96	25.29	26.56	21,02
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	75.00	66.29	62.82	66.04	67.01	58,32
4	Nilai Opini BPK terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Magelang, Tahun 2021

Indikator kinerja makro fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan terdiri dari 4 (empat) indikator. Pada 3 (tiga) indikator awal, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat, menunjukkan tingkat kemampuan Kota Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari realisasi ketiga indikator tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami kontraksi. Lesunya perekonomian memicu daya beli yang rendah sehingga sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu sektor jasa dan pariwisata yang menjadi salah satu andalan sumber pendapatan di Kota Magelang belum bisa berjalan normal akibat dampak pandemic Covid-19.

Capaian indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2021 triwulan II mencapai 31,26%.. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan masih terkategori Sangat Rendah (SR), yang artinya Pemerintah Kota Magelang dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Adapun perbandingan

antara PAD dengan Dana Transfer Pusat dan Propinsi di Kota Magelang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Proporsi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020

Kode Rek.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Pendapatan Asli Daerah	26,23%	25,68%	27,52%	28,27%	30,73%
4.2	Dana Perimbangan	67,57%	60,81%	62,82%	59,32%	55,55%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	6,20%	13,51%	9,66%	12,41%	13,72%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : BPKAD Kota Magelang Tahun 2020

Apabila melihat tabel di atas, maka akan terlihat komposisi setiap komponen pendapatan daerah dan terlihat bahwa kontributor terbesar adalah Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Magelang masih tergolong rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan dengan menggali potensi pendapatan. Tingkat Kemandirian Kota Magelang ditunjukkan dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat. Tinggi rendahnya tingkat kemandirian daerah akan menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja indikator Derajat Otonomi Fiskal, atau sering disebut juga dengan Desentralisasi Otonomi Fiskal, mengalami tren menurun dari tahun ke tahun. Pada triwulan II tahun 2021, capaian indikator sebesar 21,02%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam menyelenggarakan desentralisasi, yakni kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD belum optimal dalam membiayai pembangunan daerah.

Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat bergantung pada 2 komponen yaitu jumlah pendapatan transfer yang diterima dan total penerimaan daerah. Rasio pada triwulan II tahun 2021 ini masih berada dibawah target yaitu 58.32%. Namun kondisi pada triwulan II ini belum memberikan gambaran utuh Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat karena kondisi perekonomian Kota Magelang yang masih lesu akibat pandemic Covid- 19. Kelesuan perekonomian ini mengakibatkan penerimaan pendapatan Kota Magelang secara umum mengalami penurunan.

Adapun indikator nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang adalah Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan opini yang dikeluarkan BPK untuk LKPD Kota Magelang Tahun 2020. Walaupun demikian, masih ada catatan atas LKPD yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Magelang yaitu terkait aset. Namun secara umum, perolehan opini WTP bagi Pemerintah Kota Magelang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang sudah baik. Adapun jumlah rekomendasi atas aset adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Rekomendasi BPK Terkait Aset Daerah

No.	Tahun	Jumlah Temuan Terkait Aset	Keterangan
	2016	11	-
	2017	5	-
	2018	6	-
	2019	9	-
	2020	10	-

Sumber : BPKAD Kota Magelang, Tahun 2021

Jumlah rekomendasi yang bertambah dari tahun sebelumnya bukan berarti menunjukkan penurunan kualitas pengelolaan aset oleh Pemerintah Kota Magelang. Jumlah rekomendasi BPK yang bertambah diharapkan akan semakin memperbaiki manajemen pengelolaan aset di Pemerintah Kota Magelang.

Inovasi-inovasi baru senantiasa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Fungsi Penunjang Keuangan. Inovasi tersebut diharapkan akan memudahkan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat termasuk juga wajib pajak. Inovasi yang dilakukan:

1. Aplikasi terkait BPHTB yaitu Si Bahenol;
2. Aplikasi terkait retribusi online yaitu Si Retro;
3. Aplikasi terkait retribusi pasar yaitu Bakul Pasar;
4. Aplikasi terkait dengan PAD online yaitu Pak Dewo;
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mitra melalui asistensi dan konsultasi Ruang Pojok Pintar;
6. Penerapan IPAD (Integrasi Pendapatan Asli Daerah) dan sinkronisasi dengan sistem CMS (Cash Manajemen System) Bank Jateng;
7. Pemasangan tapping box untuk memonitoring data hasil usaha WP apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh WP;
8. Penerapan e-tax dan e-retribusi untuk mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi melalui sistem online.

Kinerja pembangunan daerah Kota Magelang salah satunya dapat diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2015-2021. Kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan pada fungsi penunjang pemerintahan keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 9 indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kinerja Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Penunjang Keuangan

No	Indikator	Target RPJMD s.d 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Triwulan II)	Kinerja terhadap Target RPJMD	Status
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									
	- Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah	80	53,53	74.36	75.24	76.18	77.91	84,33	105.41	ST
	- Barang milik daerah yang didayagunakan	100	100	100	100	100	100	100	100	ST
	- Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100	97.83	100	96,55	100	100	100	100	ST
	- Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100	97.83	100	100	100	100	100	100	ST
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
	- Persentase Pertumbuhan PAD	10,21	18.02	6.01	6.99	9.47	6.16	-28,19	-276.10	SR
	- Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90	100	100	100	100	100	100	111.11	ST
3	Program Peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
	- Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	12	11.79	13.36	13.72	14.78	12.38	19,91	165,02	ST
	- Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	2,91	3.02	2.67	2.26	3.33	1.78	2,80	96,22	ST

Sumber : BPKAD Kota Magelang, Tahun 2021

Dari kesembilan indikator kinerja pada Fungsi Penunjang Pemerintah Keuangan capaiannya sangat baik. Ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang capaiannya Sangat Tinggi (ST), 1 (satu) indikator yang capaiannya Rendah (R), dan 1 (satu) indikator yang capaiannya Sangat Rendah (SR).

Di antara indikator kinerja yang capaiannya Sangat Tinggi (ST), kinerja Fungsi Penunjang Pemerintah Keuangan yang tertinggi adalah capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, yakni 165,92%. Hal ini menunjukkan unsur yang diharapkan memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD hingga pada Triwulan II ini adalah dari Pajak Daerah. Untuk realisasi PAD Triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan II Tahun 2021

Kode	Keterangan	Target	Realisasi	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.850.446.000	122.024.083.055	57,33
4.1.1	Pajak Daerah	32.597.000.000	18.190.616.346	55,80
4.1.2	Retribusi Daerah	4.913.993.000	3.411.251.309	69,42
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.214.013.000	5.926.194.425	58,02
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	165.125.440.000	94.496.020.975	57,23

Sumber : BPKAD Kota Magelang, 2021

Melihat prosentase kontribusi PAD dari tabel di atas, unsur tertinggi sebagai kontributor PAD adalah dari Retribusi Daerah. Namun apabila dibandingkan dengan target yang ada di RPJMD maka capaian Pajak Daerah telah melampaui target yang ditetapkan di akhir tahun RPJMD walaupun untuk realisasinya masih 55,80%.

Namun apabila dikaitkan dengan pertumbuhan PAD maka capaian pertumbuhan PAD Sangat Rendah (SR) walaupun pada triwulan II ini PAD telah mencapai 57,33% dibandingkan target yang hendak dicapai pada tahun 2021. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2020, maka realisasi pertumbuhan PAD sangat rendah yaitu -28,19%. Hal dikarenakan lesunya perekonomian di Kota Magelang yang masih mengalami kontraksi akibat pengaruh dari pandemi Covid-19. Rendahnya daya beli masyarakat dan juga rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat pada masa pandemi ini menjadi penyebab dari lesunya roda perekonomian di Kota Magelang. Realisasi PAD terhadap potensi PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2015-2021

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kinerja Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target PAD
2015	152.806.995.000,-	186.677.410.081,-	122,17%
2016	197.465.478.000,-	220.217.864.000,-	111,52%
2017	218.085.185.000,-	233.392.755.573,-	107,02%
2018	225.916.332.000,-	249.873.268.826,-	110,60%
2019	242.404.296.000,-	273.534.038.858,-	112,84%
2020	255.038.220.000,-	290.427.994.347,-	113,88%
2021 (TW II)	212.850.446.000,-	122.024.083.055,-	57,33%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Magelang sampai dengan 2020 TW 2, BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kota Magelang, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Magelang sudah mencapai separo lebih dari yang ditargetkan pada Tahun 2021 di triwulan II ini. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan dalam APBD Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2021 sebesar Rp. 212.850.446.000,- tercapai sebesar Rp. 122.024.083.055,- atau sebesar 57,33%. berdasarkan hal tersebut, maka diprediksikan target pendapatan pada tahun 2021 dapat tercapai dengan kerjasama dari seluruh stakeholder.

Adapun Kendala yang dihadapi pada urusan keuangan adalah:

1. Kondisi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini berdampak pada penerimaan PAD dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kota Magelang serta pertumbuhan PAD di Kota Magelang.
2. Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah).
3. Kurang optimalnya pengadministrasian dan pemanfaatan asset milik Pemerintah Kota Magelang. Hal ini terlihat dari opini WTP yang walaupun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun tetap ada rekomendasi terkait perbaikan manajemen asset daerah di Kota Magelang.

Hasil evaluasi capaian kinerja Urusan Keuangan di atas berimplikasi pada beberapa hal ke depannya. Beberapa indikator masih perlu diupayakan pencapaiannya. Implikasi pencapaian tersebut adalah:

1. Melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Sehingga tingkat perekonomian di Kota Magelang dapat kembali seperti sebelumnya yang diharapkan akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak secara online serta melakukan inovasi-inovasi sehingga wajib pajak merasa nyaman dan dimudahkan dalam membayar pajak.
3. Melakukan pengamanan terhadap asset daerah sehingga asset daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.8 berikut :

TABEL 2.7
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2021*)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 *)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian			Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11	12
2.18 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	50%	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar OPD (Jenis)	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2 jenis	50,00%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa rekening telepon, air, listrik, dan internet untuk kelancaran tugas (Jenis)	5	jenis	5	jenis	5	jenis	5	jenis	100%	5 jenis	41,09%	5 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional. (unit)	50	kendaraan	65	kendaraan	50	kendaraan	50	kendaraan	100%	59 unit	37,45%	59 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	43	orang	12	Bulan	43	orang	43	orang	100%	40 orang	76,06%	40 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kebersihan yang tersedia	22	jenis/item	22	jenis	22	jenis/item	22	jenis/item	100%	22 jenis/item	61,94%	22 jenis/item	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis atk yang tersedia	48	jenis	48	jenis	48	jenis	48	jenis	100%	48 jenis	99,53%	48 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang yang dicetak	15	jenis	15	jenis	15	jenis	15	jenis	100%	15 jenis	93,81%	15 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis peralatan penerangan gedung yang tersedia	17	jenis	17	jenis	17	jenis	17	jenis	100%	17 jenis	90,83%	17 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	surat kabar	3	surat kabar	3	jenis	3	jenis	100%	3 jenis	55,48%	3 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis logistik kantor yang terpenuhi	2	jenis	2	jenis	3	jenis	3	jenis	100%	2 jenis	52,35%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (karyawan)	57	karyawan	12	Bulan	57	karyawan	57	karyawan	100%	80 karyawan	75,40%	80 karyawan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kefgiatan koordinasi antar daerah	76	kegiatan	12	Bulan	12	bulan	12	bulan	100%	76 kegiatan	34,79%	76 kegiatan	100%

4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jumlah tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan yang tersedia	8	orang	9	Orang	7	orang	7	orang	100%	8 orang	55,99%	8 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah data administrasi yang dikelola	57	file	82	File	57	file	57	file	100%	57 file	61,00%	57 file	100%
4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (%)	100	%	100	%	100	%	100	%	100%			100%	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan kantor yang terpenuhi	3	Jenis	3	Jenis		Jenis		Jenis	100%	2 unit	100%	3 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor milik OPD yang terpelihara (Unit)	1	unit	1	Unit	4	unit	4	unit	100%	1 unit	79,46%	1 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50	unit	70	Unit	50	unit	50	unit	100%	50 unit	95,00%	50 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7	jenis	41	Unit	7	jenis	7	jenis	100%	7 jenis	73,00%	7 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang terpelihara	6	jenis	8	Jenis	6	jenis	6	jenis	100%	6 jenis	73,74%	6 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jenis mebeleur kantor yang terpelihara	0	buah	29	Buah	27	buah	27	buah	100%	27 buah	0%	0 buah	0%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bagian gedung kantor yang direhabilitasi	3	unit	237,00	m2	0	unit	0	unit	0%	0 unit	0%	0 unit	0%
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya kegiatan perkantoran													
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja skpd	12	laporan	12	Dokumen	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	98,21%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jenis laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	2	jenis laporan	2	Jenis	2	jenis laporan	2	jenis laporan	100%	2 jenis laporan	91,48%	2 jenis laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja penetapan dan renja perubahan	2	jenis dokumen	2	Dokumen	2	jenis dokumen	2	jenis dokumen	100%	2 jenis dokumen	93,84%	2 jenis dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	45,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra OPD	1	dokumen				dokumen		dokumen	100%	1 dokumen	50%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500	berkas	1800	berkas	1500	berkas	1500	berkas	100%	1500 berkas	57,00%	1500 berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	97,62%	1 dokumen	100%

	Pemerintah (LKj IP) OPD															
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel														
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	jumlah pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Dokumen	75	Buku	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	jumlah Penetapan Perda tentang APBD	1	raperda	4	dokumen	1	raperda	1	raperda	100%	1 raperda	1,43%	1 raperda	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	jumlah Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD	3	dokumen	3	dokume	3	dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	0,00%	3 dokumen	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	jumlah Penetapan Perda tentang Perubahan APBD	1	raperda	4	dokumen	1	raperda	1	raperda	100%	1 raperda	0,08%	1 raperda	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD	2	raperwal	4	dokumen	2	raperwal	2	raperwal	100%	2 raperwal	59,02%	2 raperwal	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda tentang pertanggungjawaban APBD	1	Raperda	1	Perda	1	Raperda	1	Raperda	100%	1 Raperda	94,71%	1 Raperda	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban APB	1	Raperwal	1	Perwal	1	Raperwal	1	Raperwal	100%	1 Raperwal	94,73%	1 Raperwal	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi	1	aplikasi	2	aplikasi		aplikasi		aplikasi	100%	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	jumlah laporan posisi kas daerah kepada Kementrian Keuangan RI setiap bulan	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	56,00%	12 Laporan	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen rancangan KUA	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	37,00%	2 dokumen	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen Rancangan PPAS	0	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0%	0 dokumen	0%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen rancangan Perubahan KUA	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	2 dokumen	100%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen Rancangan Perubahan PPAS	0	dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	0 dokumen	0%	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	jumlah DPA SKPD yang diteliti	29	OPD	29	Opd	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%	

4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	jumlah DPA SKPD yang disahkan	29	OPD	29	Opd	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	51,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPP, Laporan Sertifikasi, dan Laporan Rekonsiliasi SKPD	6	Laporan	500	Berkas	6	Laporan	6	Laporan	100%	6 Laporan	75,00%	6 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Jumlah Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang Sesuai dengan Ketentuan	5000	SP2D	3000	SP2D	5000	SP2D	5000	SP2D	100%	5000 SP2D	59,20%	5000 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Jumlah Kegiatan penerbitan Surat Pengesahan Dana (SPD)	9	kegiatan	170	SP2D	9	kegiatan	9	kegiatan	100%	9 kegiatan	66,28%	9 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	720	dokumen	12	dokumen	720	dokumen	720	dokumen	100%	720 dokumen	57,12%	720 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan keuangan OPD yang diteliti dan diasistensi	720	laporan	348	Laporan	72	laporan	72	laporan	100%	720 laporan	58,00%	720 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	Jumlah SPM yang diterbitkan	0	SPM	1800	SPM	1700	SPM	1700	SPM	100%	1700 SPM	99,97%	0 SPM	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Jumlah laporan verifikasi dan pergeseran anggaran kas	29	OPD	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	75,92%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12	laporan	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	88,85%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	jumlah Laporan informasi penganggaran daerah	0	laporan	2	Laporan	0	laporan	0	laporan	0%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	Jumlah kegiatan penyusunan anggaran kas	9	Kegiatan	170	Dokumen	9	Kegiatan	9	Kegiatan	100%	9 Kegiatan	0,00%	9 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	50%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	jumlah DPPA SKPD yang disahkan	29	OPD	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah Penatausahaan Permohonan Bantuan dan Tak Terduga	1031	Berkas	2500	berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	100%	1031 Berkas	70,00%	1031 Berkas	30%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah yang akuntabel	0	laporan	12	laporan	0	laporan	0	laporan	0%	0 laporan	0%	0 laporan	0%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	12	Laporan	12	laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	79,46%	12 Laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	jumlah Laporan bulanan PPKD	0	laporan	12	Laporan	0	laporan	0	laporan	0%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Jumlah sekolah dengan bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74	sekolah	74	sekolah	74	sekolah	74	sekolah	100%	74 sekolah	61,00%	74 sekolah	54%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop	0	pegawai	73	pegawai	60	pegawai	60	pegawai	100%	0 pegawai	%	0 pegawai	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120	orang	100	Orang	120	orang	120	orang	100%	120 orang	54,92%	120 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan)	0	SP2D	1400	SP2D	1.100	SP2D	1.100	SP2D	100%	0 SP2D	%	0 SP2D	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	81,00%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Kebutuhan (Berkas)	1031	Berkas	1500	Berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	100%	1031 Berkas	69,60%	1031 Berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Jumlah laporan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D	0	Jenis Dokumen	4	Jenis dokumen	4	Jenis Dokumen	4	Jenis Dokumen	100%	0 Jenis Dokumen	0%	0 Jenis Dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan	0	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	Daftar Gaji OPD sebagai Dasar Penerbitan SP2D	470	Daftar Gaji	1400	SP2D	470	Daftar Gaji	470	Daftar Gaji	100%	470 Daftar Gaji	53,73%	470 Daftar Gaji	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2	kegiatan			2	kegiatan	2	kegiatan	100%	2 kegiatan	100,00 %	2 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.	0	laporan	1	laporan	6	laporan	6	laporan	100%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	0	wajib pajak	350	Wajib pajak	300	wajib pajak	300	wajib pajak	100%	0 wajib pajak	0%	0 wajib pajak	0%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	30	SK	50	Sk	50	SK	50	SK	100%	30 SK	64,99%	30 SK	100%

	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB (Laporan)	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	65,09%	12 Laporan	100%
	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang terverifikasi dan terdistribusi (SPPT)	36200	SPPT	36200	SPPT	36200	SPPT	36200	SPPT	100%	36200 SPPT	97,06%	36200 SPPT	100%
	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan Pendapatan Daerah	jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	60,04%	12 laporan	100%
\	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek PBB yang telah terdigitalisasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan (Peta)	1	peta	1	peta	1	peta	1	peta	100%	1 peta	75,00%	1 peta	100%
	Implementasi tapping box	jumlah laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	69,20%	12 laporan	100%
	Penatausahaan administrasi pemungutan pajak reklame dan pajak air tanah	Jumlah laporan pencapaian target pajak reklame dan PAT	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	62,87%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkat dan teradministrasinya pengelolaan Barang Milik Daerah													
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Limit Barang Milik Daerah yang akan dipindahtanganan	2	kegiatan	1	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	2 kegiatan	12,42%	2 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	4	kegiatan	1	tahun	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	39,41%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil penelitian penjualan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah	4	Kegiatan	3	kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	4 Kegiatan	47,29%	4 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Sarana olahraga Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun.	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	100%	2 lapangan	43,53%	2 lapangan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun	4	gedung kantor	3	unit	4	gedung kantor	4	gedung kantor	100%	4 gedung kantor	41,37%	4 gedung kantor	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Data BMD yang mutakhir.	12	kegiatan	12	bulan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	12 kegiatan	70%	12 keg	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	Jumlah pekerjaan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4	paket			4	paket	4	paket	100%	4 paket	32,65%	4 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6	jenis laporan	6	jenis	6	jenis laporan	6	jenis laporan	100%	6 jenis laporan	61,00%	6 jenis laporan	100%

4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan asset daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dijual	3	paket	5	paket	3	paket	3	paket	100%	3 paket	46,40%	3 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan asset daerah	jumlah laporan penyelamatan aset	0	Laporan	12	bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	Jumlah kegiatan penaksiran Barang Milik Daerah	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	41,35%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD kepada petugas pengelola BMD OPD.	4	kegiatan	4	kegiatan	4	Laporan kegiatan	4	Laporan kegiatan	100%	185 orang; 4 Laporan	46,00%	185 orang; 4 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai kategori.	3	kegiatan	3	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	3 kegiatan	36,32%	3 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	10	dokumen	2	dokumen	10	dokumen	10	dokumen	100%	10 dokumen	47,26%	10 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	jumlah kegiatan pemberian hak atas tanah negara	0	Kegiatan	12	Laporan kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot.	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 dokumen	1,69%	12 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Laporan data tanah milik Pemerintah	2	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	0 laporan	0,00%	2 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Jumlah bidang batas fisik tanah	0	bidang	2	bidang	2	bidang	2	bidang	100%	0 bidang	0%	0 bidang	0%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Perpanjangan 10 STNK kendaraan dan KIR 5 bus	18	unit			18	unit	18	unit	100%	18 unit	16,42%	18 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB untuk gedung kantor/Rumdin/Mess.	20	SPPT	6	SPPT	20	SPPT	20	SPPT	100%	20 SPPT	0,00%	20 SPPT	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Jumlah pembayaran PBB tanah milik Pemda (Bidang)	223	bidang	198	tanah	223	bidang	223	bidang	100%	223 bidang	0,00%	223 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Rumah dinas dan mess yang terpelihara selama 1 tahun.	5	bangunan	6	rumdin	6	rumah dinas	6	rumah dinas	100%	5 bangunan	29,39%	5 bangunan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10	unit	17	unit	18	unit	18	unit	100%	10 unit	33,64%	10 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	jumlah Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan	0	laporan	4	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
	Penyediaan jasa pengelolaan Barang Milik Daerah	Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	bulan	13	orang	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	45,53%	12 bulan	100%

	Penatan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	jumlah Penatagunaan Tanah Pemkot dan Tersedianya Data Tanah Pemkot yang Akurat	0	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	100%	0 Kecamatan	0%	0 Kecamatan	0%
	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kodefikasi Barang	jumlah Perwal tentang Kodefikasi Barang yang tersedia	0	perwal	1	Perwal	0	perwal	0	perwal	0%	0 perwal	0%	0 perwal	0%
	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Tanah untuk bangunan tempat kerja	1	lokasi	0	Lokasi	1	lokasi	0	Lokasi	0%	1 lokasi	0%	1 lokasi	100%

Keterangan : *) Data sampai dengan Triwulan II 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang

Renja Perubahan Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang disusun pada masa transisi antara pelaksanaan tahun terakhir Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang juga disusun secara paralel dengan penyusunan Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Renja Perubahan 2021 berdasarkan pada RKPD Perubahan Kota Magelang Tahun 2021 yang mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama, berdasarkan identifikasi masalah, mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2020 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.6 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Wujud pelayanan BPKAD Kota Magelang dalam menunjang kinerja Fungsi Penunjang Keuangan adalah pelayanan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8
Sasaran Strategi Tahun 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW II	%
Terciptanya laporan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100
	2. Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	90%	100%	111,11
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	84,33%	105,41
	2. Barang Milik Daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%
	3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%
	4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%

Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	1. Derajat Otonomi Fiskal	35,62%	23,82%	66,87%
	2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat	63,65%	66,07%	96,2%
	3. Persentase Pertumbuhan PAD	10,21%	-28,19%	- 276,12%
	4. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	12%	14,91%	124,23%
	5. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	2,91%	2,80%	96,07%

Adapun pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel 2.8 berikut:

TABEL 2.9
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2019	2020	2021	2022	2020	2021 *)	2022	2023	
1	Derajat otonomi fiskal		31,96%	33,88%	35,62%	35,62%	26,56%	23,92%	35,62%	35,62%	
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat		67,45%	65,79%	63,65%	63,65%	67,01%	66,07%	63,65%	63,65%	
3	Rasio pajak daerah terhadap PAD		12,33%	12,15%	12%	12%	12,38%	14,91%	12%	12%	
4	Rasio retribusi daerah terhadap PAD		3,33%	3,10%	2,91%	2,91%	1,78%	2,80%	2,91%	2,91%	
5	Prosentase pertumbuhan PAD		12,83%	11,37%	10,21%	10,21%	6,16%	-28,19%	10,21%	10,21%	
6	Penerapan ASB dalam proses penganggaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persetujuan Raperda tentang APBD		Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	14 September 2020	-	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	
8	Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan		Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	4 September 2020	-	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	
9	Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10	Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan		5	1	1	1	1	-	1	1	
11	Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP		87%	90%	90%	90%	100%	100%	90%	90%	
12	Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD		Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	27-Jul-20	-	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	
13	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang		70%	100%	80%	80%	77,91%	84,33%	80%	80%	
14	Barang Milik yang didayagunakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Magelang

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Isu global utama saat ini yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mengharuskan pemerintah daerah untuk bersikap dengan melakukan penanganan dan pencegahan perluasan dampaknya. Adapun pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menghadapi isu penting sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara regulasi, rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi kepentingan lokal, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada prinsipnya Perda ini meratifikasi secara mutatis mutandis PP Nomor 12 Tahun 2019, namun terdapat beberapa detil yang pada intinya menyesuaikan kepentingan daerah tanpa melanggar ketentuan regulatif peraturan di atasnya.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk pemyertaan modal, pembentukan dan acadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perarutran perundangan yang berlaku.

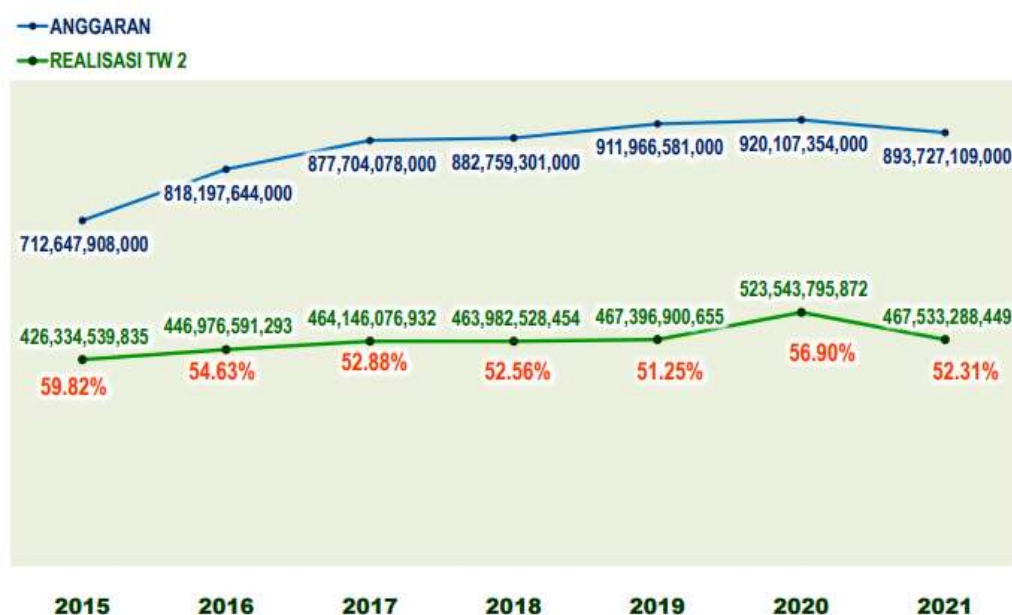
Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki tugas salah satunya yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Belum terpenuhinya kualitas dokumen penganggaran daerah. Penyusunan dokumen penganggaran dianggap berkualitas ketika memenuhi asas tepat waktu dan konsisten. Namun masih ada dokumen yang belum tepat waktu penyampaian ke DPRD dan belum dapat memenuhi asas konsisten.	Melaksanakan peningkatan kualitas dokumen perencanaan dengan mematuhi dari setiap proses penganggaran dan memberikan sosialisasi kepada OPD untuk menjaga konsistensi dokumen penganggaran.
2.	Kurang efektifnya proses penatausahaan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang. Kurang efektifnya proses penatausahaan dan penyajian LKPD disebabkan OPD belum memiliki pemahaman yang sama mengenai standar penatausahaan dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Magelang. Hal ini akan menyebabkan adanya potensi penumpukan pertanggungjawaban di akhir tahun dan adanya potensi temuan atau rekomendasi dari BPK dikarenakan penyajian LKPD kurang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Melaksanakan inovasi dan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas proses penatausahaan dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Magelang.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan maupun pengelolaan pendapatan daerah di BPKAD Kota Magelang bisa dikatakan sudah on the track atau cukup baik. Hal ini didasarkan pada capaian realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang selalu bisa melampaui target sebesar 50%. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar diagram realisasi penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2015 hingga Triwulan II Tahun 2021 dibawah ini :

Gambar 2.3.1 Diagram Realisasi Pendapatan Daerah



Namun demikian di dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah ini agar terus berjalan baik dan meningkat tentu tidak lepas dari berbagai hambatan maupun resiko yang menyertainya. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	<p>Kurang optimalnya penerimaan PAD, di antaranya dikarenakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada kesenjangan antara potensi Wajib Pajak (WP) pada objek pajak tertentu dengan wajib pajak yang patuh membayar pajak - Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah). - Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan potensi pajak, sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak. - Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan

	<p>sering ditemukan adanya tindakan illegal yang dapat mengurangi pemasukan PAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang optimalnya penarikan pajak, retribusi serta sumber-sumber PAD yang lain dikarenakan dampak pandemic Covid-19. 	<p>dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inovasi-inovasi agar potensi pungutan pajak dan retribusi masih tetap bisa dilaksanakan dengan optimal terutama pada masa pandemi. Hal ini dimaksudkan Wajib Pajak (WP) dan petugas merasa aman, nyaman serta merasakan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi. - Memberikan relaksasi baik dari sisi besaran maupun waktu jatuh tempo pajak agar wajib pajak dan UMKM dapat konsentrasi untuk memulihkan usaha mereka - Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta melakukan monitoring baik dengan menggunakan TMD (Tax Monitoring Device) seperti penggunaan Tapping Box pada mesin kasir maupun peninjauan secara langsung agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menambah penggunaan TMD ke objek pajak yang potensial namun belum dipasang mesin TMD.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Guna mewujudkan tertib administrasi dan juga pemanfaatan Barang Milik Daerah juga diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan

pengelolaan barang milik daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Belum optimalnya pemahaman pengelolaan aset/Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang yang terdapat di OPD-OPD.	Melakukan pembinaan, rekonsiliasi, dan asistensi secara kontinyu kepada Pengurus Barang di OPD-OPD.
2.	Kurang optimalnya pengadministrasian dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Magelang. Hal ini membawa pengaruh pada berkurangnya PAD yang bersumber dari pemanfaatan barang milik daerah.	Melaksanakan inovasi dan sosialisasi dalam rangka agar optimalisasi administrasi aset daerah dapat terlaksana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2021

Hasil evaluasi tahun berjalan atas implementasi kebijakan keuangan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2021 sampai dengan pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2021 mengalami dinamika yang sangat signifikan. Pandemi covid-19 yang masih berlanjut hingga semester I tahun 2021 bahkan mengalami eskalasi tak terduga merupakan faktor pengubah terbesar asumsi dimaksud. Beberapa regulasi yang dirilis untuk antisipasi hal ini antara lain PMK Nomor 17 Tahun 2021, termasuk kebijakan untuk melakukan refocusing dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar 8%. Selain itu adanya reduksi atau pemotongan transfer senilai mendekati 4% menjadi fakta fiskal yang mempengaruhi kebijakan keuangan daerah pada semester 2. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro yang diatur melalui Inmendagri No 3 Tahun 2021 hingga Inmendagri No 17 Tahun 2020 tentang PPKM Darurat menjadi variabel tak terbantahkan perubahan kebijakan keuangan daerah. Dengan demikian arah kebijakan keuangan daerah tahun 2021 juga harus disesuaikan.

Dalam situasi pandemic Covid19 khusus untuk mendukung pemulihan ekonomi yang aman dari Covid 19, maka kebijakan keuangan pada perubahan RKPD Kota

Magelang secara umum diarahkan untuk sinkronisasi penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah serta kebijakan kedaruratan yang melibatkan penanganan dampak kesehatan serta jaring pengaman sosial lanjutan. Di samping itu, intervensi atas upaya pencapaian target-target indikator kinerja pemerintah daerah pada periode awal RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang diawali dengan pelantikan Walikota dan wakil walikota yang baru memberikan warna tersendiri kebijakan keuangan daerah yang akan diimplementasikan pada perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2021.

2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada perubahan RKPD 2021 difokuskan untuk:

- a. Menyesuaikan target pendapatan daerah dengan kondisi perekonomian yang terdampak lanjutan pandemi Covid-19 dan kebijakan pemulihan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan memperhatikan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 di semester I yang telah mencapai realisasi 52,59% serta mengacu peraturan perundang-undangan tentang pendapatan yang terbaru.
- b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Menyesuaikan alokasi dana transfer (DAU dan DAK) dengan alokasi dari Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
- d. Menyesuaikan alokasi pendapatan hibah BOS dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Magelang, pandemi Covid-19 dan beberapa kebijakan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah target Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Magelang

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2020	APBD TA 2021	Pergeseran APBD Tahap 1	Target Perubahan 2021
	PENDAPATAN DAERAH	946.188.761.537	907.280.962.000	893.727.109.000	922.390.762.125
1	Pendapatan Asli Daerah	290.756.816.510	212.850.446.000	212.850.446.000	241.821.496.000
1,1	Pendapatan Pajak Daerah	35.958.686.531	32.597.000.000	32.597.000.000	32.792.500.000
1,2	Hasil Retribusi Daerah	5.319.316.332	4.913.993.000	4.913.993.000	5.032.925.000

1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.217.035.218	10.214.013.000	10.214.013.000	7.259.380.000
1,4	Lain-lain PAD yang Sah	240.261.778.429	165.125.440.000	165.125.440.000	196.736.691.000
2	Pendapatan Transfer	635.300.826.727	678.259.316.000	664.705.463.000	662.964.586.000
2,1	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	582.999.203.057	604.035.116.000	590.481.263.000	588.740.386.125
2.1.1	Dana Perimbangan	525.575.219.057	540.349.417.000	526.795.564.000	525.054.687.125
2.1.1.1	Dana Transfer Umum	445.147.988.273	447.281.024.000	433.727.595.000	433.727.595.000
2.1.1.1.1	DBH	28.425.592.273	24.098.096.000	24.098.096.000	24.098.096.000
2.1.1.1.2	DAU	416.722.396.000	423.182.928.000	409.629.499.000	409.629.499.000
2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	80.427.230.784	93.068.393.000	93.067.969.000	91.327.092.125
2.1.1.2.1	DAK Fisik	26.560.127.106	44.223.059.000	44.222.635.000	44.222.635.000
2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	53.867.103.678	48.845.334.000	48.845.334.000	47.104.457.125
2.1.2	Dana Insentif Daerah	57.423.984.000	63.685.699.000	63.685.699.000	63.685.699.000
2,2	<i>Transfer Antar Daerah</i>	52.301.623.670	74.224.200.000	74.224.200.000	74.224.200.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.989.055.670	57.077.200.000	57.077.200.000	57.077.200.000
2.2.2	Bantuan Keuangan	4.312.568.000	17.147.000.000	17.147.000.000	17.147.000.000
3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</i>	20.131.118.300	16.171.200.000	16.171.200.000	17.604.680.000
3.1	Pendapatan Hibah	19.563.703.991			0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	567.414.309	16.171.200.000	16.171.200.000	17.604.680.000

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2021

2.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD 2021 difokuskan untuk:

- a. Mengutamakan belanja untuk kegiatan penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi.
- b. Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ukir tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah sebagai dampak kebijakan *refocusing*.
- c. Mengutamakan belanja prioritas program-program unggulan dan prioritas dalam kepemimpinan Walikota dan wakil walikota Magelang Tahun 2021-2024 yang terdokumentasikan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

- d. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan inovasi khususnya dalam penanganan dampak pandemic Covid-19, baik dampak ekonomi, sosial, kesehatan maupun adaptasi kebiasaan baru.

Gambaran Realisasi dan Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2020-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Realisasi dan Target Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2020	APBD TA 2021	Pergeseran APBD	Target Perubahan RKPD Tahun 2021
2	BELANJA DAERAH	798.353.191.714	980.191.941.000	1.000.966.121.000	1.162.425.729.894
2.1	Belanja Operasi	657.879.303.385	742.814.563.800	781.607.890.800	839.781.079.640
2.1.1	Belanja Pegawai	315.070.595.219	392.186.240.000	411.746.240.000	377.928.850.034
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.083.062.368	342.267.699.800	361.501.026.800	453.491.605.606
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	21.817.815.798	7.273.332.000	7.273.332.000	7.273.332.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	907.830.000	1.087.292.000	1.087.292.000	1.087.292.000
2.2	Belanja Modal	116.558.397.390	207.377.377.200	208.358.230.200	280.220.395.531
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.783.211.520	32.400.000.000	32.400.000.000	47.754.500.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.325.288.806	54.361.132.200	55.281.910.200	94.888.227.531
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.885.805.077	70.056.472.000	70.116.547.000	77.042.129.000
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.676.097.819	48.554.984.000	48.554.984.000	57.280.196.000
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.887.994.168	2.004.789.000	2.004.789.000	3.255.343.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	23.915.490.939	30.000.000.000	11.000.000.000	42.424.251.723
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.915.490.939	30.000.000.000	11.000.000.000	42.424.251.723
2.4	Belanja Transfer	0	0	0	0

2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0	0	0	0
	Surplus/Defisit	147.835.569.823	-72.910.979.000	-107.239.012.000	-240.034.967.769

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2021

2.4.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di tahun anggaran 2021 pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan SiLPA TA 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai dengan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor 161/S/XVIII.SMG/05/2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang tahun 2020 dan target pembiayaan daerah tahun 2021, tahun 2021 akibat penyesuaian covid-19 dan perubahan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2020-2021

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2020	APBD TA 2021	Pergeseran APBD Tahap 1	Target Perubahan 2021
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	107.052.397.946	84.410.979.000	118.739.012.000	251.561.967.769
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.045.397.946	84.390.979.000	118.719.012.000	251.541.967.769
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				

3.1.7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.373.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
3.2.1	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.373.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
	<i>Pembiayaan netto</i>	103,679,397,946	72.910.979.000	107.239.012.000	240.061.967.769
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	251.514.967.769	0	0	0

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2021

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target RPJMD dalam perencanaan target belanja daerah tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 serta prakiraan majunya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Target Belanja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI	14,842,057,000	15,083,012,000	16,021,953,500
	Belanja Pegawai	9,056,952,000	9,660,340,000	8,707,234,200
	Belanja Barang dan Jasa	5,665,105,000	5,422,672,000	7,314,719,300
	Belanja Hibah	120,000,000	0	0
2.2	BELANJA MODAL	15,194,000,000	294,000,000	294,000,000
	Belanja Modal Tanah	15,000,000,000	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	100,000,000	100,000,000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	194,000,000	194,000,000	194,000,000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30,000,000,000	15,500,000,000	32,000,000,000
	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000	15,500,000,000	32,000,000,000
	Jumlah Belanja	60,036,057,000	30,877,012,000	48,315,953,500

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Perubahan Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang sudah tercantum semua dalam rancangan awal Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2021 sesuai tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.14
Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2021
Kota Magelang

OPD : BPKAD Kota Magelang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan oleh OPD					
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				27,779,460,800	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				27,779,460,800	
	KEUANGAN				27,779,460,800	KEUANGAN				27,779,460,800.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang		12,424,105,800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan	96,67	12,424,105,800	

			Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. (%)					BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. (%)			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (%)	100	33,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (%)	100	33,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (<i>Dokumen</i>)	3,00	5,586,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (<i>Dokumen</i>)	3,00	5,586,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (<i>Dokumen</i>)	1,00	3,681,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (<i>Dokumen</i>)	1,00	3,681,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun (<i>Dokumen</i>)	1,00	3,415,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun (<i>Dokumen</i>)	1,00	3,415,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (<i>Dokumen</i>)	1,00	4,049,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (<i>Dokumen</i>)	1,00	4,049,000	
	Koordinasi dan	Badan Pengelola	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1,00		Koordinasi dan	Badan Pengelola	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1,00		

	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keuangan dan Aset Daerah	yang disusun (<i>Dokumen</i>)		4,049,000	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keuangan dan Aset Daerah	SKPD yang disusun (<i>Dokumen</i>)		4,049,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (<i>Laporan</i>)	12,00	12,720,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (<i>Laporan</i>)	12,00	12,720,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)</i>	100	9,129,617,800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)</i>	100	9,129,617,800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (<i>personil</i>)	55,00	9,046,807,800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (<i>personil</i>)	55,00	9,046,807,800	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (<i>Laporan</i>)	24	15,667,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (<i>Laporan</i>)	24	15,667,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun (<i>Laporan</i>)	18	67,143,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun (<i>Laporan</i>)	18	67,143,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan (%)</i>	100	2,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan (%)</i>	100	2,000,000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (Kegiatan)</i>	1	2,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (Kegiatan)</i>	2	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah (%)</i>	100	279,745,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah (%)</i>	100	279,745,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya (Ruangan)</i>	35	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya (Ruangan)</i>	35	6,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian (Orang)</i>	80	15,464,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian (Orang)</i>	80	15,464,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dan jenis barang yang dicetak (jenis)</i>	15	13,530,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dan jenis barang yang dicetak (jenis)</i>	15	13,530,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)</i>	3,00	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)</i>	3,00	5,400,000
	Penyediaan Bahan/Material	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan (jenis)</i>	22,00	8,023,000	Penyediaan Bahan/Material	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan (jenis)</i>	22,00	8,023,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)</i>	40,00	21,576,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi</i>	40,00	21,576,000

								(kunjungan)			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	40,00	209,752,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	40,00	209,752,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	580,176,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	580,176,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah surat yang dikelola (Surat)	2.000	83,544,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah surat yang dikelola (Surat)	2.000	83,544,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (Jenis)	5,00	365,124,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (Jenis)	5,00	365,124,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah pegawai Non ASN yang dibayarkan upah dan tunjangan (dalam 1 tahun) (orang)	4,00	131,508,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah pegawai Non ASN yang dibayarkan upah dan tunjangan (dalam 1 tahun) (orang)	4,00	131,508,000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	80	1,552,103,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan	80	1,552,103,000		

								daerah (%)			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara (unit)</i>	24,00	158,982,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara (unit)</i>	24,00	158,982,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (unit)</i>	63,00	381,513,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (unit)</i>	63,00	381,513,000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)</i>	16,00	70,306,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)</i>	16,00	70,306,000		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara (Unit)</i>	3,00	144,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara (Unit)</i>	3,00	144,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi (Bangunan)</i>	12,00	797,302,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi (Bangunan)</i>	12,00	797,302,000		

2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)</i>	85,33	11,909,202,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)</i>	85,33	11,909,202,000
					361,593,000					361,593,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas penganggaran daerah (%)</i>	90		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas penganggaran daerah (%)</i>	90	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen KUA dan PPAS tahun 2023 (dokumen)</i>	2	42,267,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen KUA dan PPAS tahun 2023 (dokumen)</i>	2	42,267,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 (dokumen)</i>	2	46,309,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 (dokumen)</i>	2	46,309,000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023 (dokumen)</i>	28	26,517,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023 (dokumen)</i>	28	26,517,000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen RKPA SKPD (dokumen)</i>	28	6,810,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah dokumen RKPA SKPD (dokumen)</i>	28	6,810,000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi (dokumen)</i>	28	7,087,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi (dokumen)</i>	28	7,087,000

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah perubahan DPA SKPD yang terverifikasi (dokumen)	28	7,087,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah perubahan DPA SKPD yang terverifikasi (dokumen)	28	7,087,000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD (dokumen)	3,00	131,696,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD (dokumen)	3,00	131,696,000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan (dokumen)	2	93,820,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan (dokumen)	2	93,820,000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)	80	240,125,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)	80	240,125,000
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya dokumen pencairan SP2D Belanja (dokumen)	112	10,560,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya dokumen pencairan SP2D Belanja (dokumen)	112	10,560,000
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (laporan)	12	14,314,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (laporan)	12	14,314,000

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan daerah (laporan)</i>	16	14,650,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan daerah (laporan)</i>	16	14,650,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)</i>	2	39,932,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)</i>	2	39,932,000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan aliran kas (laporan)</i>	12	134,139,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan aliran kas (laporan)</i>	12	134,139,000
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	1	26,530,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	1	26,530,000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	86	307,484,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	86	307,484,000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah berita Acara hasil rekonsiliasi (dokumen)	103	42,314,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah berita Acara hasil rekonsiliasi (dokumen)	103	42,314,000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan konsolidasi bulanan (laporan)	12	36,088,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan konsolidasi bulanan (laporan)	12	36,088,000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Raperda tentang Pertanggungja Pelaksanaan AP dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjaw Pelaksanaan APBD (dokumen)	2	99,376,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Raperda tentang Pertanggungja Pelaksanaan AP dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjaw Pelaksanaan APBD (dokumen)	2	99,376,000

	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan prognosis (laporan)</i>	1	16,794,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan prognosis (laporan)</i>	1	16,794,000
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Raperwal tentang Bagan Akun Standar dan Kebijakan Akuntansi (dokumen)</i>	1	33,455,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Raperwal tentang Bagan Akun Standar dan Kebijakan Akuntansi (dokumen)</i>	1	33,455,000
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi (dokumen)</i>	1	11,117,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi (dokumen)</i>	1	11,117,000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pembinaan (laporan)</i>	4	68,340,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pembinaan (laporan)</i>	4	68,340,000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	100	11,000,000,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	100	11,000,000,000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak (laporan)</i>	12	11,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak (laporan)</i>	12	11,000,000,000
3.	PROGRAM PENGELOLAAN	Badan Pengelola Keuangan dan	<i>Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	83	1,498,047,000	PROGRAM PENGELOLAAN	Badan Pengelola Keuangan dan	<i>Cakupan Pengelolaan Barang</i>		1,498,047,000

BARANG MILIK DAERAH	Aset Daerah	(%)			BARANG MILIK DAERAH	Aset Daerah	Milik Daerah (%)			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	83	1,498,047,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	83	1,498,047,000	
Penyusunan Standar Harga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya (dokumen)</i>	2	41,000,000	Penyusunan Standar Harga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya (dokumen)</i>	2	41,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)</i>	7	30,645,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)</i>	7	30,645,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	1	229,770,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	1	229,770,000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen inventarisasi BMD (dokumen)</i>	2	178,620,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen inventarisasi BMD (dokumen)</i>	1	178,620,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja (laporan)</i>	2	547,126,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja (Lokasi)</i>	1	547,126,000	
Penilaian Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)</i>	6	166,236,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)</i>	6	166,236,000	

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan kegiatan usulan Penggunaan, Paemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	7	72,942,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan kegiatan usulan Penggunaan, Paemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	7	72,942,000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah BA Rekonsiliasi Kegiatan Barang Milik Daerah OPD yang mutakhir (dokumen)</i>	1	59,840,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah BA Rekonsiliasi Kegiatan Barang Milik Daerah OPD yang mutakhir (dokumen)</i>	1	59,840,000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	14	102,079,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	14	102,079,000
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	4	44,925,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	4	44,925,000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)</i>	24	1,948,106,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)</i>	24	1,948,106,000

	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)</i>	100	1,948,106,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)</i>	100	1,948,106,000
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Kegiatan perencanaan Pengelolaan pajak daerah (laporan)</i>	1,00	1,248,359,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah (laporan)</i>	1,00	1,248,359,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah (laporan)</i>	4	14,185,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah (laporan)</i>	4	14,185,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan SIM Pendapatan Daerah (laporan)</i>	4	5,993,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan SIM Pendapatan Daerah (laporan)</i>	4	5,993,000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah Peta dan Data Objek Pajak PBB yang Terupdate (Peta Obyek Pajak PBB)</i>	17	63,137,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Peta digitasi PBB yang terupdate (peta)</i>	17	63,137,000
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen BPHTB yang Tervalidasi Jumlah Laporan Penilaian PBB P2 (dokumen, laporan)</i>	800,12	28,681,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Penilaian PBBP2 (laporan)</i>	15	28,681,000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah berkas SPPT PBBP2 (berkas)</i>	36.000	115,271,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah berkas SPPT PBBP2 (berkas)</i>	36.000	115,271,000

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Realisasi pendapatan dan laporan realisasi per jenis Pajakk (laporan)</i>	12	12,558,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Realisasi pendapatan dan laporan realisasi per jenis Pajakk (laporan)</i>	12	12,558,000	
	Penagihan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pemeriksaan wajib pajak Jumlah Laporan Tunggakan Wajip Pajak (laporan, laporan)</i>	1 12	322,484,000	Penagihan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pemeriksaan wajib pajak Jumlah Laporan Tunggakan Wajip Pajak (laporan, laporan)</i>	1 12	322,484,000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan pemeriksaan wajib pajak Jumlah laporan tunggakan wajib pajak (laporan)</i>	1 12	117,310,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan pemeriksaan wajib pajak Jumlah laporan tunggakan wajib pajak (laporan)</i>	1 12	117,310,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan Evaluasi capaian Target pendapatan (dokumen)</i>	4,00	20,128,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan Evaluasi capaian Target pendapatan (dokumen)</i>	4,00	20,128,000	
					27,779,460,800					27,779,460,800	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep *money follow programme priority*. Beberapa fenomena seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 juga memiliki imbas yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang.

Resesi ekonomi dunia dan imbas pandemi yang menghantam Indonesia sejak awal tahun 2020 melahirkan beberapa respon kebijakan adaptif pada skala nasional sampai level daerah. Perlambatan perekonomian sudah mulai dirasakan pada Triwulan I 2020 dimana pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai 2,97 persen. Kontraksi terus berlangsung sampai dengan akhir tahun. Data BPS mengungkap sampai dengan Triwulan III 2020 perekonomian nasional berkontraksi -3,49 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Sampai akhir tahun 2020 secara perlahan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik meski masih terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen. Perlambatan Dampak pandemi juga mulai terlihat dengan meningkatnya persentase penduduk miskin di Maret 2020 menjadi pada angka 9,78 persen. Capaian indikator makro nasional s.d tahun 2020 bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Nasional, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,07	5,17	5,02*	-2,07**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07	Agust 2020
IPM (%)	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	
Indeks Gini	0,897	0,393	0,389	0,382	0,381	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	Maret 2020

Sumber: BPS, 2021

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Dampak pandemi mulai dirasakan di Jawa Tengah sejak Triwulan I 2020 dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di angka 2,6 persen. Kontraksi terjadi di Triwulan III dengan pertumbuhan sebesar -3,93 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan kontraksi Triwulan II 2020 yang mencapai -5,92 persen. dialami hampir seluruh lapangan usaha. Pada akhir tahun tercatat kontraksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin mulai dirasakan di Maret 2020 yang naik sebesar 0,61 poin menjadi sebesar 11,41 persen.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,27	5,32	5,41*	-2,65**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,57	4,51	4,49	6,48	Agust 2020
IPM	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	
Inflasi (%)	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56	
Rasio Gini (Maret)	0,366	0,365	0,378	0,361	0,362	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41	Maret 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Identifikasi Isu-isu Strategis Pelayanan OPD

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
1.	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Belum optimalnya sistem pajak online
2.	Tata kelola dan reformasi birokrasi	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan yaitu denda pajak bagi WP yang menunggak pembayaran pajaknya
3.	Keuangan Negara	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar tanpa Pengecualian	Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB) perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
4.	Keuangan Negara	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
			71 Tahun 2010

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dampak pandemi Covid-19 masih tetap menjadi perhatian serius dalam rencana perubahan pembangunan tahun 2021, karena masa akhir pandemi yang belum dapat diperkirakan, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang antara lain menyebutkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 secara nyata mengganggu aktivitas ekonomi dengan pengaruhnya melumpuhkan kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi;
2. Respon kebijakan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi resiko pandemi untuk peningkatan belanja kesehatan, dan menjaga aktifitas usaha, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat;
3. Langkah langkah harus diambil guna mengatasi kondisi dampak pandemi dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan ekonomi dan dunia usaha terdampak.

Visi Misi Wali Kota Magelang Terpilih 2021-2024

Visi Misi Walikota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026, dan harus sudah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2022. Visi misi Walikota dengan periode jabatan 2021-2024 adalah:

”KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”

Penjelasan makna unsur VISI dan upaya perwujudannya ditempuh melalui MISI untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan pembangunannya. Visi dan 5 (lima) misi dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Maju	Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
Sehat	Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta lingkungan yang sehat.
Bahagia	Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang bahagia ditandai dengan keadaan masyarakat Kota Magelang yang senang, tenang, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diterjemahkan ke dalam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran dan berlandaskan imtaq;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan: dan
5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan tata ruang dan infrastruktur.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Renja Perubahan Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang yang akan diwujudkan ditunjukkan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021P
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	89,28%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan	89,76%

			Keuangan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	23,82%

3.3 Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk unsur penunjang urusan pemerintahan. Secara terperinci indikator Program beserta targetnya pada Perubahan Renja 2021 BPKAD Kota Magelang yang mendukung visi dan misi Walikota Magelang serta prioritas dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Program

NO	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Pengembangan inovasi daerah untuk kematangan smart city	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran	100%
			Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan	100%

			Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	82,76% %
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola	85,71%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	100%

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 sebagaimana yang tersaji dalam Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) program dan 13 (tiga belas), dan 70 (tujuh puluh) sub kegiatan atau bertambah 3 (tiga) sub kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang sejumlah 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 Kota Magelang akan efektif apabila ditopang dengan efektifitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Guna meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mulai berlaku untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021, sehingga dokumen Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 akan mengimplementasikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah,

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Demikian pula untuk nomenklatur di Renja Perubahan 2021 mengalami perubahan sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 yaitu terdiri dari 4 (empat) program yang terbagi dalam 1 (satu) program yang ada di setiap perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta program-program sesuai urusan yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah masing-masing sebanyak 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Total pagu indikatif / kebutuhan dana dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk Tahun 2021 sebesar Rp.27.779.460.800,- dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD. Berikut disampaikan rincian keempat program tersebut:

1. Program yang ada di setiap perangkat daerah, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 12.424.105.800,-
2. Program yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah sesuai urusannya, yaitu:
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.909.202.000,-
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.498.047.000,-
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.948.106.000,-

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 3.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Magelang

KODE	Program / Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	TARGET Perub. 2021	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				27,779,460,800				24,733,252,625
5.02	KEUANGAN				27,779,460,800				24,733,252,625
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. (%)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	97	12,424,105,800	Dana Alokasi Umum			11,109,132,725
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	33,500,000	Dana Alokasi Umum		100	46,824,150

		(%)							
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	5,586,000	Dana Alokasi Umum		100	10,000,000
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	3,681,000	Dana Alokasi Umum		100	13,222,700
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	3,415,000	Dana Alokasi Umum		100	3,888,500
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	4,049,000	Dana Alokasi Umum		100	1,969,000
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	4,049,000	Dana Alokasi Umum		100	2,820,400
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12,00	12,720,000	Dana Alokasi Umum		100	14,923,550
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	9,129,617,800	Dana Alokasi Umum		100	9,260,388,350
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (personil)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	55,00	9,046,807,800	Dana Alokasi Umum		100	9,225,901,000
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24	15,667,000	Dana Alokasi Umum		100	22,972,400
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18	67,143,000	Dana Alokasi Umum		100	11,514,950

	eran SKPD								
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	2,000,000	Dana Alokasi Umum		100	45,000,000
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	2,000,000	Dana Alokasi Umum		100	45,000,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	279,745,000			100	181,054,900
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya (Ruangan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35	6,000,000	Dana Alokasi Umum		100	6,900,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian (Orang)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80	15,464,000	Dana Alokasi Umum		100	3,680,000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah dan jenis barang yang dicetak (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15	13,530,000	Dana Alokasi Umum		100	15,198,400
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	5,400,000	Dana Alokasi Umum		100	6,210,000
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22,00	8,023,000	Dana Alokasi Umum		100	7,608,000
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40,00	21,576,000	Dana Alokasi Umum		100	23,733,000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40,00	209,752,000	Dana Alokasi Umum		100	117,725,500

5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	580,176,000	Dana Alokasi Umum		100	481,951,200
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah surat yang dikelola (Surat)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2,000	83,544,000	Dana Alokasi Umum		100	862,500
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (Jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,00	365,124,000	Dana Alokasi Umum		100	419,727,000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah pegawai Non ASN yang dibayarkan upah dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (orang)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4,00	131,508,000	Dana Alokasi Umum		100	61,361,700
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80	1,552,103,000	Dana Alokasi Umum		100	1,093,914,125
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara (unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24,00	158,982,000			100	147,260,300
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	63,00	381,513,000	Dana Alokasi Umum		100	511,030,100
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16,00	70,306,000	Dana Alokasi Umum		100	11,656,975

5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	144,000,000	Dana Alokasi Umum		100	88,000,000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi (Bangunan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12,00	797,302,000	Dana Alokasi Umum		100	335,966,750
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85,33	11,909,202,000	Dana Alokasi Umum		100	11,019,415,050
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Kualitas penganggaran daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90	361,593,000	Dana Alokasi Umum		100	510,056,100
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<i>jumlah dokumen KUA dan PPAS tahun 2023 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	42,267,000	Dana Alokasi Umum		100	54,794,050
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	46,309,000	Dana Alokasi Umum		100	53,255,350
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	<i>jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	26,517,000	Dana Alokasi Umum		100	55,541,550
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	<i>jumlah dokumen RKPA SKPD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	6,810,000	Dana Alokasi Umum		100	7,150,000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	131,696,000	Dana Alokasi Umum		100	158,047,950

5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	93,820,000	Dana Alokasi Umum		100	138,982,100
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80	240,125,000	Dana Alokasi Umum		100	218,031,950
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	<i>Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	7,087,000	Dana Alokasi Umum		100	28,605,100
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah perubahan DPA SKPD yang terverifikasi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	7,087,000	Dana Alokasi Umum		100	13,680,000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Tersedianya dokumen pencairan SP2D Belanja (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	112	10,560,000	Dana Alokasi Umum		100	5,395,800
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	<i>Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	14,314,000	Dana Alokasi Umum		100	5,664,900
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16	14,650,000	Dana Alokasi Umum		100	16,847,500

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	39,932,000	Dana Alokasi Umum		100	43,517,150
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	<i>Tersedianya laporan posisi kas daerah</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					100	1,213,250
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>laporan aliran kas (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	134,139,000	Dana Alokasi Umum		100	46,072,450
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	<i>Jumlah Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	26,530,000	Dana Alokasi Umum		100	30,509,500

	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	86	307,484,000	Dana Alokasi Umum		100	291,327,000
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah berita Acara hasil rekonsiliasi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103	42,314,000	Dana Alokasi Umum		100	37,000,000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah laporan konsolidasi bulanan (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	36,088,000	Dana Alokasi Umum		100	33,256,000
5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Raperda tentang Pertanggungja Pelaksanaan AP dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjaw Pelaksanaan APBD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	99,376,000	Dana Alokasi Umum		100	99,376,000
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>jumlah laporan prognosis (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	16,794,000	Dana Alokasi Umum		100	17,875,000

5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Raperwal tentang Bagan Akun Standar dan Kebijakan Akuntansi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	33,455,000	Dana Alokasi Umum		100	30,520,000
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	11,117,000	Dana Alokasi Umum		100	14,300,000
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan pembinaan (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	68,340,000	Dana Alokasi Umum		100	59,000,000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	11,000,000,000	Dana Alokasi Umum		100	10,000,000,000
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	11,000,000,000	Dana Alokasi Umum		100	10,000,000,000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83	1,498,047,000	Dana Alokasi Umum		100	1,182,582,650
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83	1,498,047,000	Dana Alokasi Umum		100	1,182,582,650
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	41,000,000	Dana Alokasi Umum		100	32,041,300
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	<i>dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	30,645,000	Dana Alokasi Umum		100	46,661,250

	Daerah								
5.02.03.2.01.05	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Paedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	24,864,000	Dana Alokasi Umum		100	26,107,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	229,770,000	Dana Alokasi Umum		100	225,883,000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	<i>Jumlah dokumen inventarisasi BMD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	178,620,000	Dana Alokasi Umum		100	70,393,800
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	547,126,000	Dana Alokasi Umum		100	371,463,800
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6	166,236,000	Dana Alokasi Umum		100	139,006,250
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan kegiatan usulan Penggunaan, Paemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	72,942,000	Dana Alokasi Umum		100	27,559,750
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	102,079,000	Dana Alokasi Umum		100	84,475,550
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	44,925,000	Dana Alokasi Umum		100	105,644,750
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24	1,948,106,000	Dana Alokasi Umum		100	1,422,122,200

5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	<i>Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	1,948,106,000	Dana Alokasi Umum		100	1,422,122,200
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	<i>Jumlah Laporan Kegiatan perencanaan Pengelolaan pajak daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	1,248,359,00	Dana Alokasi Umum		100	650,000,000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Jumlah laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	14,185,000	Dana Alokasi Umum		100	6,169,750
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan SIM Pendapatan Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	5,993,000	Dana Alokasi Umum		100	3,873,200
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>jumlah Peta dan Data Objek Pajak PBB yang Terupdate (Peta Obyek Pajak PBB)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17	63,137,000	Dana Alokasi Umum		100	150,000,000
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Jumlah dokumen BPHTB yang Tervalidasi Jumlah Laporan Penilaian PBB P2 (dokumen, laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	800,12	28,681,000	Dana Alokasi Umum		100	84,140,900
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>Jumlah berkas SPPT PBBP2 (berkas)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.000	115,271,000	Dana Alokasi Umum		100	75,000,000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Realisasi pendapatan dan laporan realisasi per jenis Pajakk (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	12,558,000	Dana Alokasi Umum		100	62,938,350
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	<i>Jumlah laporan pemeriksaan wajib pajak Jumlah Laporan</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1 12	322,484,000	Dana Alokasi Umum		100	350,000,000

		<i>Tunggakan Wajib Pajak (laporan, laporan)</i>							
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan pemeriksaan wajib pajak Jumlah laporan tunggakan wajib pajak (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 12</i>	117,310,000	Dana Alokasi Umum		<i>100</i>	20,000,000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Jumlah laporan Evaluasi capaian Target pendapatan (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>4,00</i>	20,128,000	Dana Alokasi Umum		<i>100</i>	20,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Perubahan tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG PERUBAHAN TAHUN 2021

5	0	0	2	0	0	2	0	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Terwujudnya pedoman rencana kerja dan anggaran serta capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	3,681,000	3,681,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	13,222,700
5	0	0	2	0	0	1	2	0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Terwujudnya pedoman rencana kerja dan anggaran serta capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,415,000	3,415,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,888,500
5	0	0	2	0	0	1	2	0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Terwujudnya pedoman rencana kerja dan anggaran serta capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4,049,000	4,049,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,969,000

5	0	2	0	1	2	0	1	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Terwujudnya pedoman rencana kerja dan anggaran serta capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4,049,000	4,049,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,820,400		
5	0	2	0	1	2	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Terwujudnya pedoman rencana kerja dan anggaran serta capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	12,720,000	12,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	14,923,550		
5	0	2	0	1	2	2	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,927,453,000	9,129,617,800							9,260,388,350
5	0	2	0	1	2	0	1	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (dalam 1 tahun)	Terwujudnya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	55 personil	55 personil	100 %	100 %	8,846,728,000	9,046,807,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	9,225,901,000		

5	0	0	2.	0	Pelaksana an Penatausa h aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang , Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 persen	100 persen	1500 Dokum	e2n4 Laporan	100 %	100 %	15,667,000	15,667,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 perse n	22,972,400
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T ri wulanan /Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang , Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 persen	100 persen	12 laporan	18 laporan	100 %	100 %	65,058,000	67,143,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 perse n	11,514,950
5	0	0	2.	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											39,947,000	2,000,000			45,000,000	
5	0	0	2.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Kota Magelang , Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 persen	100 persen	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	39,947,000	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 perse n	45,000,000

5	0	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										202,225,000	279,745,000			181,054,900			
	2	1	0																		
	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	17 jenis	35 Ruangan	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	6,900,000
	5																				
	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 jenis	80 orang	100 %	100 %	15,464,000	15,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,680,000
	5																				
	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dan jenis barang yang dicetak	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	13,530,000	13,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	15,198,400

5	0	2	0	1	2.	0	0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	6,210,000
5	0	2	0	1	2.	0	0	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	22 jenis	22 jenis	100 %	100 %	6,955,000	8,023,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	7,608,000
5	0	2	0	1	2.	0	0	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	40 orang	40 Kunjungan	100 %	100 %	21,576,000	21,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	23,733,000

5	0	2	0	1	2.	0	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	7 jenis	16 jenis	100 %	100 %	70,306,000	70,306,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	11,656,975
5	0	2	0	1	2.	0	0	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 unit	3 unit	100 %	100 %	144,000,000	144,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	88,000,000
5	0	2	0	1	2.	0	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi	Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 rumdin	12 Bangunan	100 %	100 %	796,772,000	797,302,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	335,966,750
5	0	2	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															31,017,178,000	11,909,202,000		11,019,415,050		
5	0	2	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah															473,384,000	361,593,000		510,056,100		

5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	47,647,000	42,267,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	54,794,050
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	46,309,000	46,309,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	53,255,350
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah RKA- SKPD	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 OPD	28 Dokumen	100 %	100 %	48,297,000	26,517,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	55,541,550
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah RKPA-SKPD	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1500 dokum	28 dokumen	100 %	100 %	47,970,000	6,810,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	7,150,000
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 OPD	28 Dokumen	100 %	100 %	12,437,000	7,087,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	28,605,100
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah perubahan DPA SKPD yang terverifikasi	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	28 dokumen	100 %	100 %	12,437,000	7,087,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	13,680,000

5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	137,433,000	131,696,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	158,047,950
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terwujudnya sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	120,854,000	93,820,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	138,982,100
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											238,034,000	240,125,000				218,031,950
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Tersedianya dokumen pencairan SP2D Belanja	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3000 dokum	e3n000 dokum	e1n00 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	68,811,400

5	0	0	2.	0	3	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	112 dokumen	100 %	100 %	10,560,000	10,560,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	5,395,800
5	0	0	2.	0	4	Penatausahaan Pembiaayaan Daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiaayaan daerah	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	14,314,000	14,314,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	5,664,900
5	0	0	2.	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16 laporan	16 laporan	100 %	100 %	14,650,000	14,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	16,847,500

5	0	2	2	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah berita acara rekonsiliasi data pajak	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 laporan	2 Dokumen	100 %	100 %	37,841,000	39,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	43,517,150
5	0	2	2	2	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Tersedianya laporan posisi kas daerah	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	1,213,250

5	0	2	2	0	2	0	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah laporan aliran kas	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	134,139,000	134,139,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	46,072,450
5	0	2	0	2	2	1	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	26,530,000	26,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	30,509,500
5	0	2	0	2	2	0	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										305,760,000	307,484,000				291,327,000	

5	0	0	2.	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Berita Acara hasil rekonsiliasi	Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	103 satker	103 Dokumen	100 %	100 %	42,279,000	42,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	37,000,000
5	0	0	2.	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah laporan konsolidasi bulanan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	37,015,000	36,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	33,256,000

					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawa Pelaksanaan AP dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjaw Pelaksanaan APB	Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 raperda	2 dokumen	100 %	100 %	99,376,000	99,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	99,376,000
5	0	0	2	0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah laporan prognosis	Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 Laporan	100 %	100 %	16,794,000	16,794,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	17,875,000

5	0	2	2	0	2	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Raperwal tentang Bagan Akun Standar dan Kebijakan Akuntansi	Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 aplikasi	1 dokumen	100 %	100 %	35,312,000	33,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	30,520,000	
5	0	2	2	0	2	0	3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi	Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	13,007,000	11,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	14,300,000	
5	0	2	2	0	2	0	3	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah laporan pembinaan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	103 satker	4 laporan	100 %	100 %	61,977,000	68,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	59,000,000	
5	0	2	2	0	2	0	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										30,000,000,000	11,000,000,000				10,000,000,000		
5	0	2	2	0	2	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Jumlah laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	Terpenuhinya Belanja Tidak Terduga	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	12 laporan	1 Tahun	1 Tahun	30,000,000,000	11,000,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	an ya	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100 %	10,000,000,000

5	0	2	0	3	2.	0	0	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan dan teradministrasi in pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	Terwujudnya Sistem Pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 laporan	2 Dokumen	100 %	100 %	181,212,000	178,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan dan teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	70,393,800
5	0	2	0	3	2.	0	0	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatkan dan teradministrasi in pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Sistem Pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lokasi	2 Laporan	100 %	100 %	15,497,126,000	547,126,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan dan teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	371,463,800
5	0	2	0	3	2.	0	0	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatkan dan teradministrasi in pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Terwujudnya Sistem Pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	6 Laporan	100 %	100 %	311,286,000	166,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan dan teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	139,006,250
5	0	2	0	3	2.	0	0	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatkan dan teradministrasi in pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan kegiatan usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Sistem Pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	7 Laporan	100 %	100 %	69,393,000	72,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan dan teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	27,559,750

5	0	0	2	0	1	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkat dan teradministrasi in pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Rekonsiliasi Kaegiatan Barang Milik Daerah OPD yang mutakhir	Terwujudnya Sistem Pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akuntabel	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 Dokumen	100 %	100 %	65,240,000	59,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkat dan teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	84,475,550
5	0	0	2	0	1	2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkat dan teradministrasi in pengelolaan Barang Milik Daerah	Ju,malah Laporan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Sistem Pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akuntabel	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 jenis	14 laporan	100 %	100 %	102,020,000	102,079,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkat dan teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	105,644,750
5	0	0	2	0	1	3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Meningkat dan teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Sistem Pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	29 OPD	4 Laporan	100 %	100 %	39,225,000	44,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkat a teradministrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	53,346,200
5	0	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											1,190,331,000	1,948,106,000				1,422,122,200
5	0	2	4	21	0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah											1,190,331,000	1,948,106,000				1,422,122,200
5	0	2	4	21	0	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasi nya pengelolaan pendapatan daerah		Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Laporan	100 %	100 %	650,224,000	1,248,359,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasi nya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	650,000,000

5	0	21	0	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 WP	4 Laporan	100 %	100 %	8,865,000	14,185,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	6,169,750
5	0	21	0	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah laporan SIM Pendapatan Daerah	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 laporan SIM	4 laporan	100 %	100 %	5,993,000	5,993,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	3,873,200
5	0	21	0	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Peta dan Data Objek Pajak PBB yang terupdate	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	300 WP	17 Peta Objek Pajak PBB	100 %	100 %	63,137,000	63,137,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	150,000,000
5	0	21	0	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah dokumen BPHTB yang tervalidasi Jumlah Laporan Penilaian PBB P2	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Kelurahan 80 SSPD	800 Dokumen 12 Laporan	100 %	100 %	28,681,000	28,681,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	84,140,900

5	0	0	21	0	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah berkas SPPT PBB P2	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	36000 berkas	100 %	100 %	65,271,000	115,271,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	75,000,000
5	0	0	21	1	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Laporan Realisasi pendapatan dan laporan realisasi per jenis Pajak	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	9,898,000	12,558,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah		62,938,350
5	0	0	21	1	1	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah laporan pemeriksa wajib pajak Jumlah Laporan Tunggakan Wajib Pajak	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 SK	1 Laporan 12 Laporan	100 %	100 %	322,484,000	322,484,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	350,000,000
5	0	0	21	1	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Laporan pemeriksaan wajib pajak Jumlah laporan tunggakan wajib pajak	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan 12 Laporan	100 %	100 %	18,310,000	117,310,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	20,000,000

5	0	0	21	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah laporan evaluasi capaian target pendapatan	Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	17,468,000	20,128,000	PENDAPATAN ASLI DAEAH (PAD)	Meningkatnya pendapatan dan teradministrasinya pengelolaan pendapatan daerah	100 %	20,000,000
TOTAL																60,036,057,000	27,779,460,800			41,388,812,450	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2021. Tujuan penyusunan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2021 serta mengacu pada perencanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2022, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada perubahan tahun 2021. Rencana Kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Perubahan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Dengan demikian maka dokumen Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi BPKAD Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), serta sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai fungsinya, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang tahun 2021 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan bidang tahun 2021 sehingga akan menjadi landasan setiap bidang dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perubahan tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dilaksanakan dengan

koordinasi antar bidang di lingkungan BPKAD Kota Magelang sehingga menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di perubahan tahun 2021.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2021, muncul isu global yang berpengaruh sampai tingkat nasional, dan regional dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID) -19 yang berdampak pada situasi ekonomi dan sosial serta penurunan kemampuan keuangan daerah yang antara lain dikarenakan penurunan dana transfer dari Pusat dan penurunan pendapatan asli daerah. Memperhatikan hal tersebut maka fokus pelayanan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian pokok dalam penyusunan perubahan rencana kerja di tahun 2021. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dokumen Renja Perubahan BPKAD Kota Magelang 2021 menjadi acuan resmi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2021, maka kaidah pelaksanaannya adalah mempedomani penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2021. Renja ini disusun dengan mengikuti regulasi baru dalam penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Demikian agar dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Magelang secara bertahap di tahun kedua periode RPJMD Kota Magelang 2021 – 2026.

Magelang, Agustus 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE

NIP. 19731014 199903 1 004